

**ANALISIS TINGKAT PERKEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN DI
KOTA PADANG PERIODE 2005-2019**

SKRIPSI

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
memperoleh gelar Sarjana Sains (S.Si)*



Oleh :

Wulan Sri Handayani
NIM 15136034/2015

**PRODI GEOGRAFI
JURUSAN GEOGRAFI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Judul : Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah Kecamatan di Kota Padang Periode 2005-2019
Nama : Wulan Sri Handayani
NIM / TM : 15136034 / 2015
Program Studi : Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 30 Agustus 2021

Disetujui Oleh :

Pembimbing



Dra. Yurni Suasti, M.Si
NIP. 19620603 198603 2 001

Mengetahui :

Ketua Jurusan Geografi



Dra. Aric Yulia, ST, M.Si
NIP. 19800618 200604 1 003

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan lulus setelah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Padang
Pada hari Rabu, Tanggal kompre 30 Agustus 2021 Pukul 11.30 – 12.10 WIB

ANALISIS TINGKAT PERKEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN DI KOTA PADANG PERIODE 2005-2019

Nama : Wulan Sri Handayani
TM/NIM : 2015/15136034
Program Studi : Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, 30 Agustus 2021

Tim Penguji :

Nama

Tanda Tangan

Ketua Tim Penguji : Ahyuni, ST, M.Si

Anggota Penguji : Triyatno, S.Pd, M.Si



Mengesahkan:
Dekan FIS UNP



Dr. Siti Fatimah, M.Pd, M.Hum
NIP. 19610218 198403 2 001



UNIVERSITAS NEGERI PADANG
FAKULTAS ILMU SOSIAL
JURUSAN GEOGRAFI

Jalan Prof. Dr. Hamka, Air Tawar Padang - 25131 Telp 0751-7875159

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

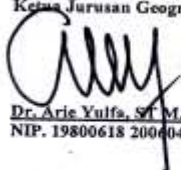
Nama : Wulan Sri Handayani
NIM/BP : 15136034/2015
Program Studi : Geografi
Jurusan : Geografi
Fakultas : Ilmu Sosial

Dengan ini menyatakan, bahwa skripsi saya dengan judul :

"Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah Kecamatan di Kota Padang Periode 2005-2019" adalah benar merupakan hasil karya saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat dari karya orang lain maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan syarat hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi Universitas Negeri Padang maupun di masyarakat dan negara.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Diketahui Oleh,
Ketua Jurusan Geografi


Dr. Arie Yulfa, ST, M.Sc.
NIP. 19800618 200404 1 003

Padang, Oktober 2021
Saya yang


Wulan Sri
NIM. 15136034/2015



ANALISIS TINGKAT PERKEMBANGAN WILAYAH KECAMATAN DI KOTA PADANG PERIODE 2005-2019

Wulan Sri Handayani¹, Yurni Suasti²
Program Studi Geografi
Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang
Email: Wulansrihandayani96@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to : 1) Determine the level of development of the sub-district in Padang City in 2005-2019. 2) Find out the region service in Padang City in 2005 and 2019. This Type of research is descriptive quantitative. The data used is secondary data obtained from several agencies such as the Central Statistics Agency and the Padang City Public Works Service. To determine the level of regional development using a composite analysis method of each parameter to measure regional development and classifying several variables contained in regional development indicators, then for regional service centers using the Marshall centrality index method. The results of this study indicate the regional development in Padang city from 2005 to 2019 experience high or advanced development in Lubuk Kilangan District, this result is because this sub-district always increases without any decrease in the number of socio-economic facilities, accessibility and population. And for the regional service in Padang City in 2005 which occupies the first order, namely in Padang Timur, Padang Barat District and Padang Selatan District, and in 2019 the regional service center in Padang Barat District because the sub-district is a central area economic growth in the city of Padang and including the downtown area so that kinds of community activities are found in the district.

Keywords : Regional Development Level, Regional service centers

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui tingkat perkembangan wilayah kecamatan di Kota Padang tahun 2005-2019. 2) mengetahui pusat-pusat pelayanan wilayah di Kota Padang tahun 2005 dan 2019. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari beberapa instansi seperti Badan Pusat Statistik dan Dinas Pekerjaan Umum Kota Padang. Untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah menggunakan metode analisis komposit dari tiap parameter untuk mengukur perkembangan wilayah serta melakukan pengklasifikasian terhadap beberapa variabel yang terdapat pada indikator-indikator perkembangan wilayah, selanjutnya untuk pusat pelayanan wilayah menggunakan metode indeks sentralitas marshall. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perkembangan wilayah di Kota Padang tahun 2005 sampai 2019 mengalami perkembangan yang tinggi atau maju berada di Kecamatan Lubuk Kilangan, hasil tersebut disebabkan karena kecamatan ini selalu mengalami kenaikan tanpa adanya penurunan terhadap jumlah fasilitas sarana sosial ekonomi, aksesibilitas dan kependudukan. Dan untuk pusat pelayanan wilayah di Kota Padang di Tahun 2005 yang menempati orde I yaitu terdapat di Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Selatan, dan di tahun 2019 pusat pelayanan wilayah nya terdapat di Kecamatan Padang Barat dikarenakan wilayah kecamatan tersebut merupakan wilayah pusat pertumbuhan ekonomi di Kota Padang dan termasuk wilayah pusat kota sehingga segala macam bentuk aktivitas masyarakat terdapat di Kecamatan tersebut.

Kata Kunci : Tingkat Perkembangan Wilayah, Pusat-pusat pelayanan wilayah

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, berkah, hidayah, karunia dan ridho-Nya. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah Kecamatan di Kota Padang Periode 2005-2019”.

Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata 1 Program Studi Geografi, Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang,

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan, bimbingan, bantuan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, diantaranya :

1. Dr. Arie Yulfa, ST, M,Sc, selaku Ketua Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Dra. Yurni Suasti, M.Si, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan dengan sabar dan bijaksana dari awal sampai akhir penyusunan skripsi ini.
3. Ahyuni, ST, M.Si dan Triyatno, S.Pd, M.Si selaku Dosen Penguji yang telah memberikan saran yang membangun sehingga skripsi ini dapat selesai.
4. Bapak dan ibu dosen Jurusan Geografi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis.
5. Dr. Siti Fatimah, M.Pd selaku dekan FIS UNP beserta Staf Karyawan yang telah mempermudah urusan penulis dalam urusan perizinan penelitian.
6. Teristimewa bagi orang tua penulis Ibunda tercinta yaitu Ibu Yulizar yang mana selalu mendo'akan, memberikan kasih sayang, dukungan moral serta material yang tak terhingga kepada penulis dan untuk Ayahanda tercinta (Alm) Bapak Dahrizal sebagai penyemangat untuk penulis dikala rasa

lelah menghampiri agar tetap berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) agar bisa membanggakan ayahanda di surga.

7. Semua pihak, Teman-teman Jurusan Geografi Universitas Negeri Padang angkatan 2015 serta rekan-rekan yang telah membantu penyelesaian skripsi ini dan tidak pernah bosan mendengarkan keluh kesah penulis dengan segala banyak macam pertanyaan dan telah sangat membantu selama menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga segala bimbingan, arahan, dorongan serta bantuan yang diberikan kepada penulis menjadi amal ibadah dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Aamiin.

Demikianlah pengantar ini penulis sampaikan. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan. Oleh karena itu penulis terbuka sepenuhnya atas segala kritikan dan saran yang membangun guna perbaikan untuk masa yang akan datang.

Padang, Agustus 2021

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	4
C. Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori.....	7
B. Penelitian Relevan.....	16
C. Kerangka Konseptual	20
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Lokasi Penelitian dan Waktu Penelitian.....	23
C. Variabel dan indikator Penelitian.....	24
D. Alat dan Bahan Penelitian	25
E. Jenis dan Sumber Data	26
F. Teknik Analisis Data	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian.....	35
B. Hasil Penelitian	39
C. Pembahasan	63
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN.....	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Variabel Penelitian	24
Tabel 2. Alat Penelitian.....	25
Tabel 3. Data dan Sumber Data Penelitian	26
Tabel 4. Skor dan Klasifikasi Data	28
Tabel 5. Luas Wilayah Administratif Kota Padang	36
Tabel 6. Klasifikasi Kemiringan lereng	36
Tabel 7. Jumlah Penduduk dan Kepadatan Penduduk	38
Tabel 8. Perhitungan Indeks Jumlah Penduduk tahun 2005-2019	40
Tabel 9. Perhitungan Indeks Kepadatan Penduduk tahun 2005-2019	41
Tabel 10. Perhitungan Indeks Sarana Pendidikan tahun 2005-2019.....	42
Tabel 11. Perhitungan Indeks Sarana Kesehatan tahun 2005-2019.....	43
Tabel 12. Perhitungan Indeks Sarana Peribadatan tahun 2005-2019.....	44
Tabel 13. Perhitungan Indeks Sarana Ekonomi tahun 2005-2019.....	45
Tabel 14. Perhitungan Indeks Luas wilayah tahun 2005-2019	46
Tabel 15. Perhitungan Indeks Panjang Jalan tahun 2005-2019	47
Tabel 16. Indeks Komposit Tingkat Perkembangan wilayah tahun 2005	96
Tabel 17. Indeks Komposit Tingkat Perkembangan wilayah tahun 2019	97
Tabel 18. Klasifikasi Tingkat Perkembangan Wilayah 2005 dan 2019.....	52
Tabel 19. Indeks Sentralitas Marshall 2005	56
Tabel 20. Orde Pusat Pelayanan Kota Padang 2005	57
Tabel 21. Indeks Sentralitas Marshall 2019	58

Tabel 22. Orde Pusat Pelayanan Kota Padang 2019	59
---	----

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1: Kerangka Konseptual	22
Gambar 2: Diagram Alir Penelitian	33
Gambar 3: Peta Administrasi Kota Padang.....	34
Gambar 4: Peta Pertumbuhan wilayah Kota Padang 2005	49
Gambar 5: Peta Pertumbuhan wilayah Kota Padang 2019	51
Gambar 6: Peta Pertumbuhan Wilayah Kota Padang 2005-2019	55
Gambar 7: Peta Pusat-pusat Pelayanan Kota Padang 2005	61
Gambar 8: Peta pusat-pusat Pelayanan Kota Padang 2019	62

LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Luas wilayah, jumlah penduduk tahun 2005 dan 2019	72
Lampiran 2. Tabel Data Prasarana pendidikan Kota Padang tahun 2005	73
Lampiran 3. Tabel Data Prasarana Pendidikan Kota Padang tahun 2019	74
Lampiran 4. Tabel Data Prasarana Kesehatan Kota Padang tahun 2005	75
Lampiran 5. Tabel Data Prasarana Kesehatan Kota Padang tahun 2019	76
Lampiran 6. Data Prasarana Peribadatan Kota Padang tahun 2005 dan 2019 .	77
Lampiran 7. Data Prasarana Ekonomi Kota Padang tahun 2005 dan 2019	78
Lampiran 8. Data Panjang Jalan Kota Padang tahun 2005 dan 2019	79
Lampiran 9. Tabel Scalling Jumlah Penduduk Tahun 2005	80
Lampiran 10. Tabel Scalling Jumlah Penduduk Tahun 2019	81
Lampiran 11. Tabel Scalling Prasarana Pendidikan Tahun 2005	82
Lampiran 12. Tabel Scalling Prasarana Pendidikan Tahun 2019	83
Lampiran 13. Tabel Scalling Prasarana Kesehatan Tahun 2005.....	84
Lampiran 14. Tabel Scalling Prasarana Kesehatan Tahun 2019.....	85
Lampiran 15. Tabel Scalling Prasarana Peribadatan Tahun 2005	86
Lampiran 16. Tabel Scalling Prasarana Peribadatan Tahun 2019	87
Lampiran 17. Tabel Scalling Prasarana Ekonomi Tahun 2005.....	88
Lampiran 18. Tabel Scalling Prasarana Ekonomi Tahun 2019.....	89
Lampiran 19. Perhitungan Indeks Komposit Tahun 2005	90
Lampiran 20. Perhitungan Indeks Komposit Tahun 2019	91
Lampiran 21. Perhitungan Bobot Prasarana Pendidikan (TK) Tahun 2005	92
Lampiran 22. Perhitungan Bobot Prasarana Pendidikan (SD) Tahun 2005.....	93
Lampiran 23. Perhitungan Bobot Prasarana Pendidikan (SMP) Tahun 2005...	94

Lampiran 24. Perhitungan Bobot Prasarana Pendidikan (SMA) Tahun	
2005.....	95
Lampiran 25. Perhitungan Bobot Prasarana Pendidikan (SMK) Tahun	
2005.....	96
Lampiran 26. Perhitungan Bobot Prasarana Pendidikan (Perguruan Tinggi)	
Tahun 2005	97
Lampiran 27. Perhitungan Bobot Prasarana Kesehatan (R.S) Tahun 2005	98
Lampiran 28. Perhitungan Bobot Prasarana Kesehatan (Puskesmas) Tahun 2005	
.....	99
Lampiran 29. Perhitungan Bobot Prasarana Kesehatan (Puskesmas Pembantu)	
Tahun 2005	100
Lampiran 30. Perhitungan Bobot Apotek Tahun 2005	101
Lampiran 31. Perhitungan Bobot Posyandu Tahun 2005	102
Lampiran 32. Perhitungan Bobot Pusat Pelayanan Prasarana Peribadatan Masjid	
Tahun 2005	103
Lampiran 33. Perhitungan Bobot Mushalla Tahun 2005	104
Lampiran 34. Perhitungan Bobot Gereja Katolik Tahun 2005	105
Lampiran 35. Perhitungan Bobot Gereja Protestan Tahun 2005	106
Lampiran 36. Perhitungan Bobot Pura/vihara Tahun 2005	107
Lampiran 37. Perhitungan Bobot Kelenteng Tahun 2005	108
Lampiran 38. Perhitungan Bobot Prasarana Ekonomin (Pasar) Tahun 2005.....	
.....	109
Lampiran 39. Perhitungan Bobot Prasarana Koperasi Tahun 2005.....	110

Lampiran 40. Perhitungan Bobot Perusahaan Perdagangan Tahun 2005	111
Lampiran 41. Perhitungan Bobot Prasarana Pendidikan (TK) Tahun 2019 ...	112
Lampiran 42. Perhitungan Bobot Prasarana Pendidikan (SD) Tahun 2019....	113
Lampiran 43. Perhitungan Bobot Prasarana Pendidikan (SMP) Tahun 2019	114
Lampiran 44. Perhitungan Bobot Prasarana Pendidikan (SMA) Tahun 2019	115
Lampiran 45. Perhitungan Bobot Prasarana Pendidikan (SMK) Tahun 2019	116
Lampiran 46. Perhitungan Bobot Prasarana Pendidikan (Perguruan Tinggi) Tahun 2019	117
Lampiran 47. Perhitungan Bobot Prasarana Kesehatan (R.S) Tahun 2019	118
Lampiran 48. Perhitungan Bobot Prasarana Kesehatan (Puskesmas) Tahun 2019	119
Lampiran 49. Perhitungan Bobot Prasarana Kesehatan (Puskesmas Pembantu) Tahun 2019	120
Lampiran 50. Perhitungan Bobot Apotek Tahun 2019	121
Lampiran 51. Perhitungan Bobot Posyandu Tahun 2019	122
Lampiran 52. Perhitungan Bobot Prasarana Peribadatan Masjid Tahun 2019.....	123
Lampiran 53. Perhitungan Bobot Mushalla Tahun 2019	124
Lampiran 54. Perhitungan Bobot Gereja Katolik Tahun 2019	125

Lampiran 55. Perhitungan Bobot Gereja Protestan Tahun 2019	126
Lampiran 56. Perhitungan Bobot Pura/vihara Tahun 2019	127

Lampiran 57. Perhitungan Bobot Kelenteng Tahun 2019	128
Lampiran 58. Perhitungan Bobot Prasarana Ekonomi (Pasar) Tahun 2019....	129
Lampiran 59. Perhitungan Bobot Prasarana Koperasi Tahun 2019.....	130
Lampiran 60. Perhitungan Bobot Perusahaan Perdagangan Tahun 2019	131

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kota merupakan kawasan hunian dengan jumlah penduduk relatif besar, tempat kerja penduduk yang intensitasnya tinggi serta merupakan tempat pelayanan umum (Marbun, 1992). Kegiatan ekonomi merupakan hal yang penting bagi suatu kota karena merupakan dasar agar kota dapat bertahan dan berkembang (Jayadinata, 1992). Kedudukan aktifitas ekonomi sangat penting sehingga seringkali menjadi basis perkembangan sebuah Kota. Adanya berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu kawasan menjadi potensi perkembangan kawasan tersebut pada masa berikutnya.

Menurut Friedman dalam Soegijoko dan Firman (2005), kota sangat berperan dalam pembangunan nasional. Pentingnya peran sebuah kota ditetapkan oleh banyak dan luasnya cakupan pelayanan fungsi-fungsi dalam kota tersebut. Fungsi kota adalah penentuan kegiatan kota yang ditetapkan berdasarkan hirarki perkotaan dengan indikator berupa kelengkapan fasilitas pelayanan kota (Dirjen Penataan Ruang Departemen Permukiman Prasarana Wilayah, (2003)

Pertumbuhan dan perkembangan kota pada prinsipnya menggambarkan proses berkembangnya suatu kota. Pertumbuhan kota mengacu pada pengertian secara kuantitas, yang dalam hal ini diindikasikan oleh besaran faktor produksi yang dipergunakan oleh sistem ekonomi Kota tersebut. Semakin besar produksi berarti ada peningkatan permintaan yang meningkat. Sedangkan perkembangan Kota mengacu pada kualitas, yaitu proses menuju

suatu keadaan yang bersifat pematangan. Indikasi ini dapat dilihat pada struktur kegiatan perekonomian dari primer kesekunder atau tersier. Secara umum Kota akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui keterlibatan aktivitas sumber daya manusia berupa peningkatan jumlah penduduk dan sumber daya alam dalam kota yang bersangkutan (Hendarto, 1997).

Seiring pertumbuhan manusia yang semakin pesat, maka kebutuhan hidup juga akan meningkat, dengan adanya pembangunan di setiap wilayah maka kebutuhan hiduppun akan tumbuh dengan merata serta harus di iringi dengan sumber daya manusia yang bagus. Salah satu tujuan pokok pembangunan daerah adalah mengembangkan pembangunan wilayah-wilayah yang ada di dalamnya terutama dalam hal perkembangan antar wilayah di daerah tersebut (Adisasmita, 2010).

Perkembangan suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh faktor teknologi serta infrastruktur yang ada di suatu daerah, infrastruktur yang termasuk di sini adalah jumlah fasilitas sarana sosial dan ekonomi wilayah, kependudukan dan aksesibilitas wilayah. Dengan tersedianya faktor tersebut memiliki peranan yang dominan dalam kemajuan suatu wilayah. Pusat pelayanan pada umumnya merupakan pusat perkembangan wilayah karena mempunyai fasilitas sarana yang lebih besar secara kualitas dan kuantitas sesuai dengan fungsi dan perannya yang mampu memberikan pelayanan bagi wilayah tersebut.

Banyaknya permintaan ketersediaan fasilitas sarana sosial ekonomi di setiap wilayah berbanding terbalik, terbalik dengan kemampuan wilayah

untuk membangun. Wilayah yang mempunyai kemampuan sangat rendah justru membutuhkan tambahan pelayanan yang lebih besar daripada wilayah yang memiliki kemampuan yang sangat tinggi, namun pada kenyataannya fasilitas-fasilitas sarana ekonomi dan sosial justru terkonsentrasi di pusat kota yang mana daerah pusat ini akan banyak diminati oleh penduduk yang menuntut lebih banyak lagi fasilitas sarana ekonomi dan sosial. Kebutuhan penduduk yang tinggal di daerah luar pusat kota yang belum terpenuhi mendorong arus penduduk ke pusat kota. Ketersediaan infrastruktur seperti sarana dan prasarana dianggap sebagai faktor potensial dalam menentukan masa depan dari perkembangan suatu wilayah.

Kota Padang merupakan Ibu Kota dari Provinsi Sumatera Barat, Kota Padang terletak di dataran rendah pantai barat pulau Sumatera dengan ketinggian 1-100 meter di atas permukaan laut dan berhadapan langsung dengan samudera hindia. Secara geografis Kota Padang terletak di antara 00°44'00"- 01°08'35"LS dan 100°05'05"- 100°34'09" BT. Luas keseluruhan Kota Padang adalah 694,96 km² atau setara dengan 1,65 persen dari luas Provinsi Sumatera Barat. Terdiri dari 11 Kecamatan yaitu, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kecamatan Koto Tangah, Kecamatan Kuranji, Kecamatan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kecamatan Nanggalo, Kecamatan Padang Barat, Kecamatan Padang Selatan, Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Utara, dan Kecamatan Pauh.

Dari berbagai macam jenis pembangunan fasilitas sarana sosial ekonomi di Kota Padang dapat berkembang secara baik dan merata untuk

menunjang perkembangan wilayahnya. Upaya untuk menunjang perkembangan wilayah maka perlu usaha pembangunan berbagai jenis fasilitas sarana sosial dan ekonomi dengan asas pemerataan pembangunan agar nantinya tidak terjadi kesenjangan antar wilayah, sehingga dapat berkembang secara bersama-sama sesuai kebutuhan penduduk.

Perkembangan pembangunan di Kota Padang masih terfokus pada pusat kota, sehingga wilayah atau Kecamatan yang jauh dari pusat Kota masih memerlukan tambahan pembangunan infrastruktur serta pelayanan sarana dan prasarana sosial ekonomi. Penelitian ini terfokus untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah Kecamatan di Kota Padang dengan mengacu beberapa indikator yaitu, indikator kependudukan, indikator sarana prasarana sosial ekonomi dan aksesibilitas, serta pusat-pusat pelayanannya.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah Kecamatan di Kota Padang Periode 2005 - 2019 ”

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat di identifikasikan masalah penelitian ialah :

1. Jumlah penduduk yang makin meningkat sehingga terjadinya ketimpangan dalam hal sarana sosial ekonomi

2. Ketidakmerataan pembangunan antar wilayah, dalam hal ini kecamatan yang jauh dari pusat kota untuk mencapai sarana dan prasarana yang lengkap.
3. Sering terjadinya kemacetan lalu lintas, dalam hal ini perlu adanya jalan pintas untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.
4. Banyaknya bermunculan pasar-pasar kaget atau pasar pagi di lingkungan perumahan atau di tepi-tepi jalan.
5. Masih kurangnya sarana prasarana pendidikan di tiap kecamatan
6. Minimnya sarana prasarana fasilitas kesehatan terutama puskesmas

C. Batasan Masalah

Sesuai latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penelitian perlu dibatasi agar penelitian lebih terfokus adapun latar belakang masalah dari penelitian ini adalah mengetahui perkembangan wilayah yang ditinjau dari kependudukan (jumlah penduduk dan kepadatan penduduk) prasarana sosial dan ekonomi serta aksesibilitas yang di tinjau dari luas wilayah dan panjang jalan serta mengetahui bagaimana pusat pelayanan di Kota Padang yang ditinjau dari kelengkapan prasarana sosial ekonomi.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan tentang perkembangan wilayah dan kesenjangan wilayah di kota padang, maka rumasan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana tingkat perkembangan wilayah Kecamatan di Kota Padang tahun 2005 dan 2019 ?

2. Bagaimana pusat-pusat pelayanan wilayah di Kota Padang tahun 2005 dan 2019?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah Kecamatan di Kota Padang tahun 2005 dan 2019
2. Untuk mengetahui pusat-pusat pelayanan wilayah Kota Padang di tahun 2005 dan 2019

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sains Strata Satu (S1) pada Program Jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang.
2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan menjadi salah satu acuan bagi penelitian selanjutnya

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Pengertian Geografi

Secara umum geografi merupakan ilmu yang mempelajari tentang lokasi serta persamaan, dan perbedaan keruangan atas fenomena fisik, dan manusia di atas permukaan bumi. Geografi diartikan sebagai ilmu yang menjelaskan mengenai persamaan dan perbedaan fenomena bumi yang dilihat dalam konteks keruangan. Sebagai contoh, Bintarto (1991) mengungkapkan bahwa geografi menjadi ilmu dalam menerangkan sifat-sifat bumi baik dalam analisa gejala alam atau makhluk hidup untuk mengetahui corak khas kehidupan dengan pendekatan keruangan.

2. Pengembangan Wilayah

Pengembangan secara umum ialah adanya suatu kegiatan yang bersifat membangun dan memperlengkap sesuatu dengan tujuan melakukan perubahan baik secara khusus ataupun umum. Selain itu pengembangan juga dapat diartikan sebagai suatu gerakan memaksimalkan suatu kinerja yang sebelumnya dianggap bermasalah atau kurang maksimal dengan melakukan interaksi penyesuaian konteks lingkungan.

Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional (UU No. 26 Tahun 2007). Wilayah adalah unit geografi dengan batas-batas spesifik tertentu

dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan pada interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu.

Perkembangan wilayah merupakan upaya untuk memacu perkembangan sosial ekonomi, mengurangi kesenjangan antar wilayah, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup pada suatu wilayah. Pengembangan wilayah sangat diperlukan karena kondisi ekonomi, budaya, dan geografis yang sangat berbeda antar suatu wilayah dengan wilayah lainnya. (Riyadi 2002). Penurunan kesenjangan antar wilayah dan pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup di suatu wilayah. Upaya ini diperlukan karena setiap wilayah memiliki kondisi sosial ekonomi, budaya dan keadaan geografis yang berbeda-beda, sehingga pengembangan wilayah bertujuan untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh suatu wilayah (Riyadi, Bratakusumah).

Perkembangan wilayah yaitu setiap tindakan pemerintah yang akan dilakukan bersama-sama dengan para pelakunya dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan yang menguntungkan bagi wilayah itu sendiri maupun bagi kesatuan administratif dimana wilayah itu menjadi bagiannya

Suatu wilayah selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, menurut Adisasmita (2010:276), salah satu indikator perkembangan wilayah adalah kemudahan. Kemudahan dalam hal ini terkait dengan cara masyarakat memperoleh kebutuhan baik kebutuhan sehari-hari. Prasarana (infrastruktur) merupakan hal yang penting dalam meningkatkan perkembangan sosial dan kegiatan ekonomi. Pembangunan tidak akan lancar jika prasarana tidak baik, aspek prasarana tersebut antara lain dalam bidang pendidikan, kesehatan perdagangan, industri dan peribadatan.

Konsep perkembangan wilayah di Indonesia lahir dari suatu proses interaktif yang menggabungkan dasar-dasar pemahaman teoritis dengan pengalaman-pengalaman praktis sebagai bentuk penerapannya yang dinamis. Dengan kata lain, konsep pengembangan wilayah di Indonesia merupakan penggabungan dari berbagai teori dan model yang selalu berkembang yang diujicobakan. Selanjutnya dirumuskan kembali menjadi suatu pendekatan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pembangunan di Indonesia.

Dengan demikian teori pusat pengembangan merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan pembangunan regional yang saling bertolak belakang, yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan keseluruhan pelosok daerah. Konsep pusat pertumbuhan diperkenalkan tahun 1949 oleh Francois Perroux yang mendefinisikan pusat pertumbuhan sebagai “pusat pancaran gaya sentripetal”. Menurut Rondinelli dan Unwin bahwa teori ini didasarkan pada keniscayaan bahwa pemerintah negara berkembang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan dengan melakukan

investasi besar pada industri padat modal di pusat Kota. Selanjutnya teori baru pertumbuhan wilayah, teori ini percaya pada kekuatan teknologi dan inovasi sebagai faktor dominan pertumbuhan wilayah, menurut teori ini faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu faktor ekonomi (Sumberdaya alam, akumulasi modal atau investasi, kemajuan teknologi) dan faktor non ekonomi meliputi (faktor sosial, seperti pendidikan dan budaya, faktor manusia seperti tenaga kerja, dan faktor politik administrasi).

3. Komponen Perkembangan Wilayah

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional.

Wilayah adalah unit geografis dengan batas-batas spesifik tertentu dimana komponen-komponen wilayah tersebut satu sama lain saling berinteraksi secara fungsional. Sehingga batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis (Rustiadi, 2006).

Tingkat perkembangan wilayah dapat dilihat secara sederhana menggunakan tiga komponen, sebagai berikut :

- a. Kependudukan
- b. Jumlah Fasilitas Sarana Sosial Ekonomi
- c. Aksesibilitas Wilayah

Untuk mengukur tingkat perkembangan wilayah dapat diukur dengan tingkat pencapaian dari tujuan pembangunan, seperti mengatasi masalah kesenjangan (Todaro, 1984 dalam Muta'ali, 2003).

Variabel yang digunakan untuk menentukan tingkat perkembangan wilayah Kecamatan di Kota Padang terdiri dari beberapa indikator yakni (1) Kependudukan, untuk mengukur tingkat perkembangan wilayah, faktor kependudukan juga termasuk dalam menentukan tingkat perkembangan suatu wilayah, karena jumlah penduduk berkaitan dengan ketersediaan sarana pelayanan sosial ekonomi yang memadai di suatu wilayah, jika jumlah penduduk semakin meningkat setiap tahunnya. Otomatis sarana pelayanan sosial ekonomi juga harus lebih ditingkatkan lagi agar tidak terjadi kesenjangan di setiap wilayah kecamatan. Indikator atau parameter dari kependudukan yaitu jumlah penduduk dan kepadatan penduduk, Jumlah penduduk merupakan sekumpulan orang banyak yang mendiami suatu tempat atau wilayah dalam kurun waktu tertentu. Faktor jumlah penduduk termasuk faktor yang mempengaruhi tingkat perkembangan wilayah, karena dari tahun ke tahun pertambahan penduduk semakin meningkat sehingga permintaan akan ketersediaan jumlah fasilitas sarana sosial ekonominya akan bertambah. Jumlah fasilitas pelayanan mengikuti keberadaan penduduk yang dilayani, sehingga semakin tinggi jumlah penduduk maka jumlah pelayanan semakin banyak (Muta'ali, 2015). Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tentunya tidak mempunyai

tingkat kepadatan yang sama. dimana daerah dengan luas wilayah yang mencukupi walaupun memiliki jumlah penduduk yang banyak, tingkat kepadatannya cenderung rendah.

(2) Sarana Prasarana Sosial Ekonomi, Sarana sosial merupakan segala pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau non pemerintah yang mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh nyata menurut fungsi sosial dari pelayanan tersebut kepada penggunanya. Sedangkan sarana ekonomi merupakan segala pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau non pemerintah yang mempunyai pengaruh langsung atau pengaruh nyata yang sangat penting dalam memudahkan kegiatan perekonomian guna menunjang percepatan perkembangan dan pertumbuhan wilayah, yang meliputi pasar, toko kelontong, warung makan, koperasi, bank, industri.

(3) Aksesibilitas. tingkat aksesibilitas pada suatu wilayah dapat di nilai dengan banyak tidaknya sistem jaringan jalan yang tersedia. Semakin banyak sistem jaringan jalan yang tersedia, maka akan semakin mudah terjadi interaksi antar wilayah, sedangkan jika sistem jaringan pada suatu wilayah itu kurang maka kegiatan aksesibilitas atau interaksi antar wilayah terhambat. Tingkat aksesibilitas wilayah dapat di ukur dengan membagi panjang jalan dengan luas wilayah, hasil dari perhitungan tersebut akan menghasilkan tingkat aksesibilitas wilayah yang dimunculkan dengan tingkat kepadatan jalan yang ada di tiap-tiap kecamatan/wilayah.

Luas wilayah dalam hubungannya dengan perkembangan wilayah sangat berkaitan dengan ketersediaan lahan yang masuk dan berkembangnya daerah pertumbuhan yang baru, sebagaimana diketahui bahwa luas wilayah bersifat tetap (statis), sedangkan manusia dan segala macam kegiatannya senantiasa berkembang dan melakukan mobilitas (dinamis). Sedangkan panjang jalan dalam hal ini untuk menunjang kelancaran transportasi dan kemudahan aksesibilitas diperlukan adanya prasarana jalan yang memadai dan dalam kondisi yang baik, yaitu panjang jalan. Semakin banyak jalan yang menghubungkan antar daerah maka akan semakin berkembang daerah tersebut. Panjang jalan yang luas di wilayah tersebut mungkin di karenakan jalan tersebut juga merupakan jalan penghubung antar wilayah kecamatan bahkan antar wilayah Kabupaten/Kota.

4. Pusat-pusat pelayanan wilayah

Pusat pelayanan wilayah merupakan pusat dimana suatu wilayah mempunyai ketersediaan fasilitas umum yang sangat memadai, dimana aksesibilitas terjangkau, dan pelayanan terjamin. Wilayah akan semakin maju ketika fasilitas memadai untuk masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Semakin tinggi perekonomian di suatu wilayah akan membuat daerah tersebut menjadi berkembang ke arah maju. Seiring dengan berkembangnya waktu dan jumlah penduduk yang semakin padat maka fasilitas umum sangatlah dibutuhkan seperti fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dan ekonomi. Dimana fasilitas tersebut nantinya akan berfungsi untuk masyarakat, serta digunakan untuk menunjang perekonomian pada suatu wilayah, sehingga

nantinya sarana dan prasarananya akan semakin lengkap dalam kurun waktu beberapa tahun kemudian.

Pusat pertumbuhan sendiri merupakan suatu wilayah yang memiliki perkembangan sangat pesat dan menjadi pusat pembangunan yang dapat mempengaruhi daerah-daerah sekitarnya. Pusat pertumbuhan merupakan (*growth center*) merupakan wilayah atau kawasan yang pertumbuhannya pesat. Sehingga dijadikan pusat pembangunan yang dipengaruhi kawasan-kawasan yang pertumbuhannya pesat. Sehingga dijadikan pusat pembangunan yang dipengaruhi kawasan-kawasan lain disekitarnya. Dengan adanya kawasan yang dijadikan sebagai pusat pertumbuhan, diharapkan kawasan-kawasan di sekitarnya ikut maju. Wilayah yang menjadi pusat pertumbuhan dapat mendorong wilayah lain yang berada di daerah sekitarnya. Semakin lama akan menyebar ke berbagai wilayah dan menyerap potensi-potensi daerah sekitarnya. Adanya pusat pertumbuhan akan mempengaruhi kehidupan manusia, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan. Pusat-pusat pertumbuhan berpengaruh terhadap berbagai sektor, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat. Fungsi dari pusat pertumbuhan adalah cepatnya pertumbuhan di suatu wilayah dapat menjadi pendorong bagi wilayah lain yang pertumbuhannya kurang. Berikut teori-teori pusat pertumbuhan yaitu:

a. Teori tempat yang sentral

Teori ini dikemukakan oleh Walter Christaller, seorang ahli geografi berkebangsaan jerman. Ia mengadakan studi persebaran permukiman, desa, dan kota yang berbeda ukuran luasnya.

Menurut teori ini, suatu lokasi pusat aktivitas yang melayani berbagai kebutuhan penduduk terletak pada suatu tempat yang sentral. Tempat yang sentral adalah suatu tempat atau kawasan yang memungkinkan partisipasi manusia yang jumlahnya maksimum, baik mereka yang terlibat dalam aktivitas pelayanan maupun menjadi konsumen.

b. Teori Kutub Pertumbuhan

Teori kutub pertumbuhan atau teori pusat pertumbuhan dikembangkan oleh Francois Perroux pada 1955. Ia mengadakan pengamatan terhadap proses pembangunan. Ia mengatakan bahwa pada kenyataannya, perkembangan dimana pun adanya bukanlah merupakan suatu proses yang terjadi secara sentral. Tapi muncul di tempat-tempat tertentu dengan kecepatan dan intensitas yang berbeda-beda tempat atau kawasan yang menjadi pusat pembangunan dinamakan kutub pertumbuhan. Dari kutub-kutub tersebut selanjutnya proses pembangunan akan menyebar ke wilayah-wilayah lain.

Dalam teori ini dikenal juga beberapa dampak diantaranya :

- Dampak baik yang disebut *trickle down effect*. Contoh dari dampak baik ini adalah meningkatnya investasi pada suatu kota yang berdampak semakin beragamnya kegiatan yang melibatkan penduduk dan menghasilkan produksi berupa barang atau jasa.

- Dampak buruk yang disebut *backwash and polarization*. Contoh dari dampak buruk ini adalah merugikan daerah sekitar pusat pertumbuhan sehingga menyebabkan banyak masyarakat perdesaan melakukan urbanisasi ke daerah pusat pertumbuhan.

c. Potensi daerah tempat sentral

Setiap tempat memiliki potensi yang dapat dikembangkan baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusianya. Sebagai contoh yaitu lahan luas di suatu wilayah dapat dikelola lahan pertanian atau perkebunan yang memperhatikan aspek lingkungannya.

d. Konsep agropolitan

Teori ini dikemukakan oleh Friedman pada tahun 1975. Konsep ini menjelaskan mengenai perlunya mengusahakan perdesaan untuk lebih terbuka terhadap pembangunan sehingga diharapkan terjadi beberapa kota di perdesaan sehingga masyarakat perdesaan dapat meningkatkan kesejahteraan seperti masyarakat perkotaan, serta dapat mengurangi arus urbanisasi dan migrasi.

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan dari penelitian ini telah dilakukan oleh Fadhli Bagash Prakoso.(2018) yang berjudul Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten tahun 2005 dan 2015. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) variasi tingkat perkembangan wilayah kecamatan berdasarkan parameter atau

variabel pengukuran tingkat perkembangan suatu wilayah yang terdiri dari parameter kependudukan, parameter aksesibilitas dan parameter sosial ekonomi. Yang mana Kecamatan yang memiliki nilai skor tertinggi menurut perkembangan kepadatan penduduk di kabupaten klaten adalah Kecamatan Klaten Utara dan Klaten Selatan. Untuk indikaor aksesibilitas wilayah di Kabupaten klaten diukur dengan membagi panjang jalan dengan luas wilayah , hasil perhitungan tersebut akan menghasilkan tingkat aksesibilitas wilayah dengan yang dimunculkan dengan tingkat kepadatan jalan yang ada di tiap-tiap Kecamatan di Kabupaten Klaten. Yang mana perkembangan aksesibilitas wilayah di Kabupaten Klaten tertinggi di Kecamatan Bayat, Trucuk, Kalikotes, Ngawen, Ceper, Pedan, Juwiring, Delanggu, Karanganom dan Jatinom. Perkembangan aksesibilitas wilayah di Kabupaten Klaten antara tahun 2010-2015 mengalami perkembangan yang signifikan. Indikator sosial ekonomi dalam penelitian ini memiliki beberapa variabel yang mendukung berkembangnya suatu wilayah, yaitu variabel pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan pelayanan perekonomian. Persebaran pelayanan pendidikan yang ada di Kabupaten Klaten belum sepenuhnya merata, hanya wilayah-wilayah tertentu yang menjadi pusat kota yang memiliki pelayanan pendidikan yang memadai. Perbedaan pelayanan pendidikan yang mencolok terdapat pada tingkat pendidikan SMA dan PT yang tentunya menimbulkan tingkat kesenjangan antar wilayah. Perbedaan tingkat pelayanan kesehatan yang terdapat di Kabupaten Klaten sangat mencolok, dimana ketersediaan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit umum hanya berada di beberapa

wilayah, seperti Kecamatan Klaten Utara, Klaten Selatan. Perkembangan jumlah sarana tertinggi di Kabupaten Klaten berada di Kecamatan Klaten Tengah, sedangkan perkembangan jumlah sarana kesehatan terendah berada di seluruh wilayah Kecamatan Kabupaten Klaten. Dalam pelayanan ekonomi yang banyak digunakan dalam menggambarkan infrastruktur wilayah, meliputi pasar tradisional, supermarket/swalayan, toko/kios dan warung. Perkembangan jumlah sarana ekonomi tertinggi di kecamatan prambanan dan kecamatan wedi. Berdasarkan hasil klasifikasi tingkat perkembangan wilayah kabupaten klaten menunjukkan bahwa Wilayah Kecamatan yang mengalami perkembangan wilayah kategori maju berada di Kecamatan Prambanan, Wedi, Klaten Tengah, Klaten Selatan dan Klaten Utara. Sedangkan Wilayah Kecamatan yang belum atau tidak mengalami perkembangan wilayah dan termasuk kategori tertinggal berada di Kecamatan Gantiwarno, Kebonarum, Karangnongko, Karangdowo, Polanharjo dan Kemalang. Wilayah yang menjadi prioritas I atau utama untuk dilakukan pengembangan wilayah adalah Kecamatan Gantiwarno, Kebonarum, Karangnongko, Karangdowo, Polanharjo dan Kemalang.

Penelitian kedua dilakukan oleh fani efendi (2012), Dengan judul Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah dan Ketimpangan Antar Wilayah di Kabupaten Pasuruan Tahun 2011 dan Tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat perkembangan wilayah di Kabupaten Pasuruan dalam perhitungan indeks komposit dengan indikator jumlah fasilitas sarana publik, kependudukan, dan aksesibilitas pada tahun 2011 tergolong kategori sedang

dengan nilai indeks 60,0 dan di tahun 2015 juga tergolong kategori sedang dengan nilai indeks 60,2. Kecamatan yang memiliki tingkat perkembangan tertinggi adalah Kecamatan Kejayaan. Tingkat ketimpangan di Kabupaten Pasuruan menggunakan indeks Williamson dan tipologi klassen dengan indikator PDRB, laju PDRB, jumlah penduduk, dan PDRB perkapita pada tahun 2011 dan tahun 2015 tergolong kategori sedang. Kecamatan yang memiliki tingkat ketimpangan wilayah tertinggi adalah Kecamatan Lekok. Arah strategi pembangunan untuk meningkatkan laju perkembangan dan mengurangi ketimpangan wilayah Kabupaten Pasuruan, berdasarkan analisis SWOT adalah memperbanyak lapangan kerja, sarana ekonomi dan memperbaiki infrastruktur .

Penelitian ketiga dilakukan oleh Oktavina Mustika Dewi (2013) , dengan hasil penelitian bahwa perkembangan wilayah di Kabupaten Kudus menunjukkan bahwa wilayah yang perkembangannya tinggi di tahun 2005 dan 2010 yaitu di Kecamatan Kaliwungu, Jekulo dan Gebong, hal ini disebabkan karena Kecamatan-Kecamatan tersebut mengalami perkembangan dari berbagai jumlah fasilitas sarana sosial ekonominya. Untuk melihat sektor unggulan di kabupaten kudus peneliti menggunakan metode LQ, yang mana sektor unggulan di Kabupaten Kudus yang mengalami peningkatan yaitu sektor industri pengolahan dan sektor listrik, gas, dan air bersih. Sektor listrik, gas dan air bersih menjadi sektor unggulan kedua yang mempunyai peranan sangat penting guna mendukung aktivitas industri pengolahan. Sektor unggul tersebut berada paling banyak di Kecamatan Kota. Untuk

mengukur tingkat kesenjangan wilayah menggunakan metode Williamson dengan nilai kesenjangan tertinggi berada di Kecamatan Kota dengan nilai sebesar 0.17 naik menjadi 0.18 dimana semakin besar nilai indeks kesenjangannya (mendekati nilai 1) maka semakin besar pula tingkat kesenjangan wilayahnya.

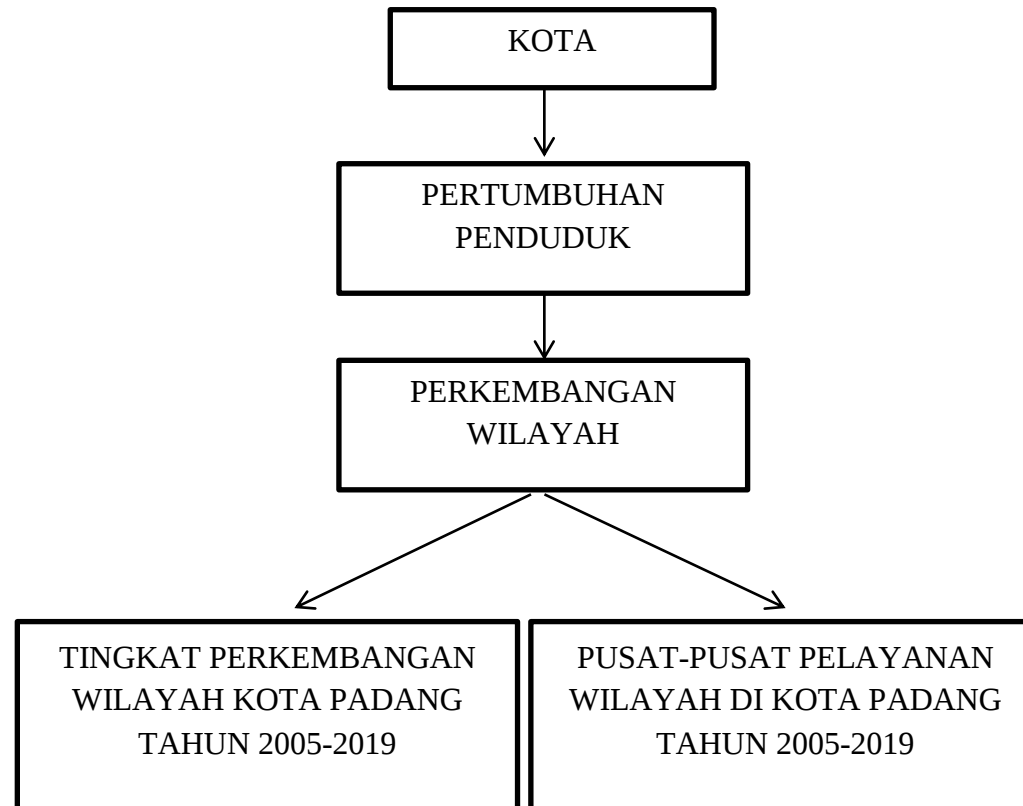
Arahan prioritas perkembangan di Kabupaten Kudus prioritas I adalah Kecamatan dengan klasifikasi rendah yaitu Kecamatan Bae, yang sebaiknya diarahkan untuk sektor bangunan dan angkutan. Arahan prioritas pembangunan tersebut di tentukan dari hasil analisis LQ sektor unggulan wialayah.

C. Kerangka Konsep

Berdasarkan kajian teori di atas untuk melihat perkembangan wilayah terdapat 3 komponen yaitu, kependudukan, sarana prasarana sosial ekonomi dan aksesibilitas. Untuk mengetahui tingkat dalam komponen kependudukan tersebut terdapat beberapa indeks yaitu indeks jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. selanjutnya komponen sarana prasarana sosial ekonomi yang mana terdiri dari indikator pendidikan yaitu (Jumlah TK,SD,SMP,SMA,SMK,PT) dan untuk sarana kesehatan terdiri dari indikator (Jumlah Rs, Puskesmas, pustu dan apotek, posyandu, rumah bersalin). Selanjutnya sarana ekonomi indikatornya yaitu (Pasar, koperasi, perusahaan perdagangan mikrondan makro). Selanjutnya komponen aksesibilitas yang terdiri dari indikator luas wilayah dan panjang jalan. Indikator-indikator tersebut di dapat dari data sekunder yang di peroleh

melalui instansi Badan Pusat Statistik, Dinas Pekerjaan Umum, BAPPEDA serta instansi lainnya yang berkaitan dengan data penelitian. Setelah data diperoleh maka data tersebut nanti akan diolah menggunakan analisis indeks komposit untuk mengetahui tingkat perkembangan wilayah dengan cara menscalingkan berbagai indeks di atas. Setelah itu hasil scaling tersebut akan dikompositkan/dijumlahkan dan hasil penjumlahan tersebut dibuat klasifikasi kelas (tinggi, sedang, rendah). Yang mana kelas yang mempunyai nilai tertinggi merupakan wilayah maju dari tingkat perkembangan wilayah.

Selanjutnya setelah kita mengetahui tingkat perkembangan wilayah Kecamatan di Kota Padang, maka untuk mengetahui pusat pelayanan yang ada di kecamatan Kota Padang maka kita akan menggunakan analisis metode skalogram dengan indeks sentralitas marshall. Metode skalogram digunakan untuk menscalingkan data-data yang nantinya akan diolah menggunakan metode indeks sentralitas marshall, indeks sentralitas marshall digunakan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Semakin tinggi perkembangan suatu wilayah berarti wilayah tersebut semakin mampu memberikan kepada masyarakatnya. Hasil dari analisis tersebut nanti akan terlihat dimana saja pusat-pusat pertumbuhan atau pelayanan yang ada di Kota Padang. Dari rumusan masalah diatas nantinya akan mengetahui hasil dari tingkat perkembangan di tiap-tiap kecamatan dan pusat-pusat pertumbuhan yang ada di Kota Padang.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat Perkembangan wilayah di Kota Padang Tahun 2005 – 2019 yang termasuk dalam klasifikasi Tinggi berada di Kecamatan Lubuk Kilangan, untuk klasifikasi sedang terdapat di Kecamatan Lubuk Begalung dan terendah berada di Kecamatan Padang Timur.
2. Keterpusatan pelayanan di Kota Padang tahun 2005 terdapat di Kecamatan Padang Timur, Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Selatan. Dan di tahun 2019 terdapat di Kecamatan Padang Barat, dan untuk orde II terdapat di Kecamatan Koto Tangah pada tahun 2019. Dan untuk Orde III pada tahun 2005 terdapat di Kecamatan Padang Utara dan Koto Tangah. Dan di tahun 2019 yang menempati orde III yaitu terdapat di Kecamatan Padang Timur. Dan untuk Kecamatan lainnya memiliki orde yang tetap yang mana terdapat di orde IV dan orde V.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, peneliti sangat sadar bahwa penelitian ini masih memiliki banyak kekurangan, maka peneliti memberikan saran yaitu Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan dalam tingkat perkembangan wilayah. Serta tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi harus diimbangi dengan kelengkapan prasarana sesuai dengan kebutuhan penduduk agar prasarana sosial ekonomi dapat tumbuh merata di tiap wilayah sehingga mengurangi terjadinya kesenjangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Sutomo. 2015. Kajian kemiskinan dan Perkembangan Wilayah Kabupaten Purwalingga Dalam Perspektif Geospasial, Jurnal Infastruktur, Vol. 4 (2), halaman 97-104
- Agustinus Kaeng Udiarto. 2015. Karakteristik Pengembangan Wilayah Sebelum dan Sesudah Pemekaran Kabupaten Jayapura. Jurnal. wilayah dan lingkungan, Vol 3 (2), halaman 121 – 130
- Muta'ali, luthfi. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta : PT. Bumi Aksara.
- Novtaviana Anggraeni, Belinda Ulfa Aulia. 2018. Penentuan Tingkat Kesenjangan Wilayah dan Faktor Penyebab Terjadinya Kesenjangan di Kabupaten Gresik. Jurnal. Teknik ITS, Vol 7 (2)
- Purwanto, dwi. 2004. Evaluasi Ketersediaan Fasilitas Sarana Pelayanan Sosial Ekonomi Penduduk di Kabupaten Sleman. Skripsi. Yogyakarta : Fakultas Geografi UGM.
- Fadli Bagash Prakoso. 2018. Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah Kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2005 dan 2010. Surakarta: Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Moh Adenan Qohar. 2013. Kajian Pembangunan Wilayah Untuk Penentuan Tingkat Perkembangan Wilayah di Kabupaten Lamongan. Jurnal. Mahasiswa Unesa, Vol 2 (2)
- Wilonoyudho, Sarati. 2009. Kesenjangan Dalam Pembanguann Kewilayahan. Surakarta: Jurnal Forum Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta Vol 23.
- Adisasmita, Rahardjo. 2010. Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang. Yogyakarta : Graha ilmu
- Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2005. Padang dalam angka 2005, Kota Padang.
- Badan Pusat Statistik Kota Padang, 2019. Padang dalam angka 2019, Kota Padang
- Muta'ali, Lutfi. 2013. Teknik Analisis regional untuk Perencanaan Wilayah, Tata Ruang dan Lingkungan. Yogyakarta: Badan Penerbit Fakultas Geografi.

Oktavina Mustika Dewi, 2013. Analisis Tingkat Perkembangan Wilayah dan Hubungannya dengan Kesenjangan Antar Wilayah di Kabupaten Kudus Tahun 2005 dan 2010. Skripsi. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang

Mulyanto, 2008. Prinsip – prinsip pengembangan Wilayah,

Mahi, Ali. 2016. Pengembangan Wilayah: Prenada Media.

Nadia Maulida Fatmawati. 2018. Analisis Pertumbuhan Pusat Fasilitas Pelayanan Wilayah di Kabupaten Klaten. Surakarta. Skripsi. Surakarta: Fakultas Geografi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Tarigan, Robinson. 2006. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Bumi Aksara.

Rondinelli, Dennis A. 1985. Applied Methods of Regional Analysis: the spatial dimensions of development policy. London: Westview Press.